

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data yang telah dilakukan, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2024.
2. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2024.
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2024.
4. Tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2024.
5. Indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2024.

B. Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah perlu menyelaraskan kompetensi SDM dengan kebutuhan industri melalui program *link and match* untuk menekan pengangguran terdidik. Selain itu, diperlukan penguatan rantai pasok lokal agar daya beli tidak bocor ke luar wilayah, serta jaminan sosial bagi lansia agar keterpaksaan bekerja di sektor informal dapat diminimalisasi.
2. Dalam upaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka, pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menjaga stabilitas iklim investasi dan mengevaluasi kebijakan pengupahan agar lebih kompetitif demi mencegah relokasi industri padat karya. Langkah ini harus dibarengi dengan program

upskilling guna mencegah erosi modal manusia akibat PHK, sehingga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi regional tetap terjaga.

3. Dalam mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan produktivitas melalui pelatihan vokasi yang adaptif terhadap teknologi. Selain itu, perluasan akses informasi pasar kerja dan kebijakan pendalaman modal (*capital deepening*) sangat diperlukan agar angkatan kerja terserap optimal ke sektor formal dan fenomena pengangguran terselubung dapat ditekan.
4. Dalam menangani kemiskinan dan mendorong pertumbuhan inklusif, pemerintah perlu memperketat regulasi konversi lahan pertanian guna melindungi mata pencaharian petani lokal. Selain itu, diperlukan intervensi intensif bagi tenaga kerja tidak terlatih agar mereka dapat bertransisi dari sektor informal ke rantai pasok industri modern, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu mentransformasikan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
5. Dalam merumuskan kebijakan makroekonomi terintegrasi, pemerintah Provinsi perlu menyinkronkan kebijakan pendidikan dan kesehatan dengan penciptaan lapangan kerja formal yang produktif. Strategi ini harus dibarengi dengan pengentasan kemiskinan struktural untuk mendorong tabungan dan investasi domestik, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada industri besar, tetapi juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.
6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas rentang waktu pengamatan atau menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota untuk menangkap variasi spasial di Jawa Barat. Selain itu, model dapat disempurnakan dengan menambah variabel determinan lain seperti investasi langsung, inflasi, maupun pengeluaran pemerintah guna memperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif.